



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2021 -2026**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Perubahan ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya

Kuala Tungkal, Agustus 2022



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	9
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....	38
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA</b>	
3.1 Indikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Setda.....	40
3.2 Teladan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.....	61
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	69
<b>BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda .....	72
<b>BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>84</b>
<b>BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB. VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB. VIII. PENUTUP .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.....	26
Tabel II. T.C 24 Review Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 2016 – 2026.....	29
Tabel III. Matrix Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat.....	48
Tabel IV. Matrix Penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat.....	50
Tabel V. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.....	74
Tabel VI. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setda Kab. Tanjab Barat .....	79
Tabel VII. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	86
Tabel VIII. Tabel 7.1 Indikator Kinerja sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Tanjab Barat.....	103

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

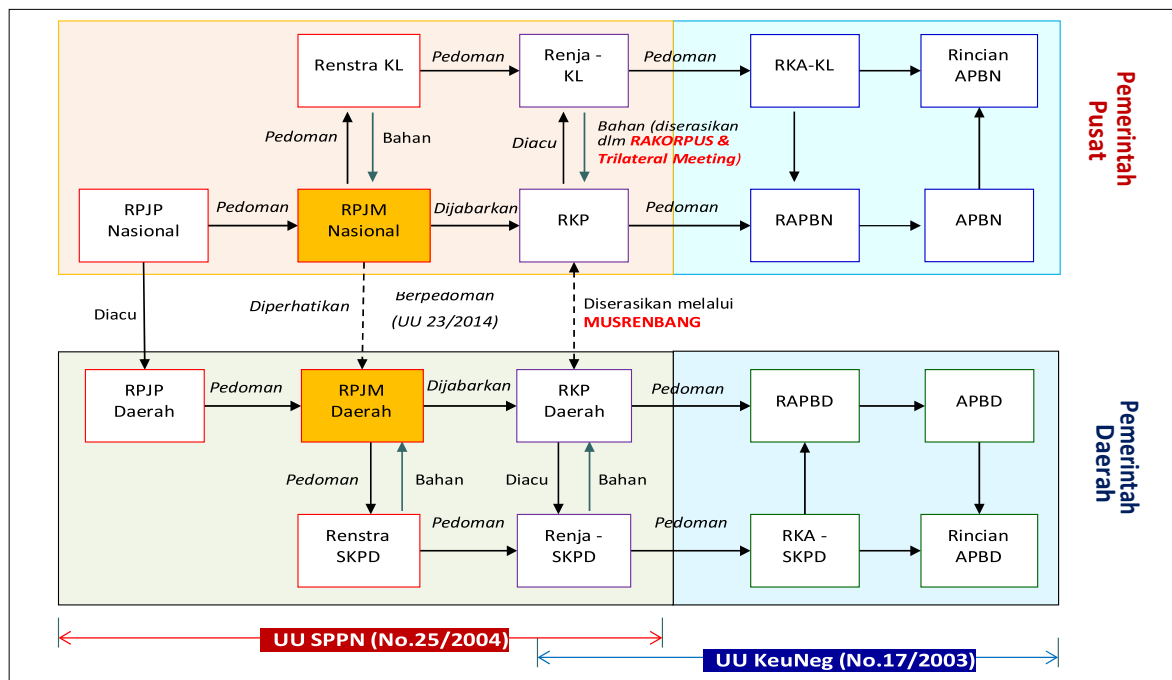
Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun,
- bagaimana mencapainya dan,
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabiupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan Nomenklatur SKPD Penanggungjawab RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021 pada Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 33).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- Peningkatan Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disepakati dalam Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya..

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;



- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kerja Sama**

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Asisten Perekonomian Dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Sumber Daya Alam**

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protocol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Peencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;



- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan; dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Staf Ahli**

1. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Staf Ahli, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

### **A. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten.

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi bagian, sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
    - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
    - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
    - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
    - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
    - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  - 3) Bagian Hukum, mencakup :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan.
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum,
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
  - 4) Bagian Kerja Sama, mencakup :
    - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri,
    - b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri,
    - c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
    - b) Sub Bagian Pengendalian Program.
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Bagian Sumber Daya Alam, mencakup :
    - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
  - 3) Bagian Perekonomian, mencakup :
    - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
    - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
    - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

- 4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mencakup :
  - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

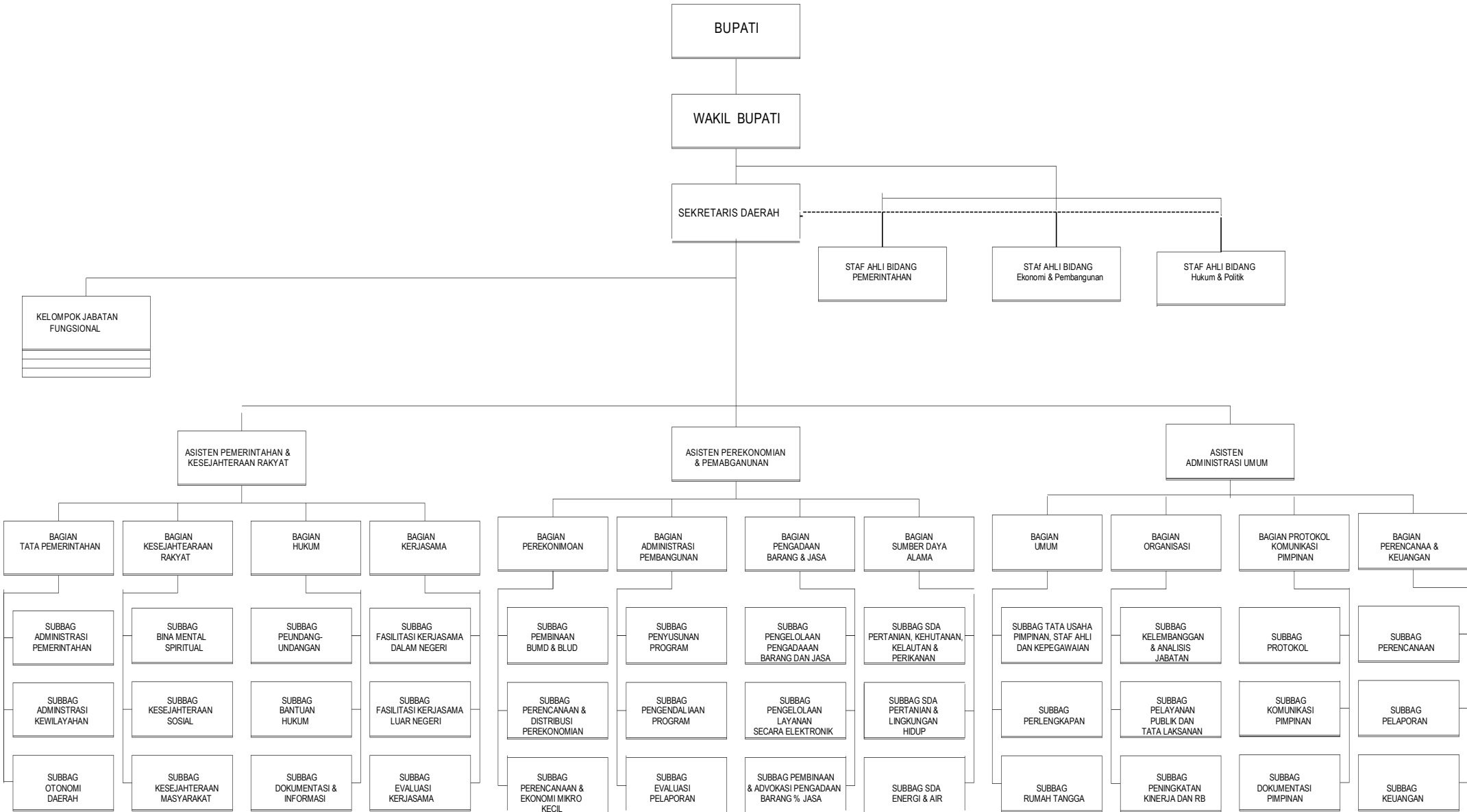
Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi dan umum yang membawahi :

- 1) Bagian Organisasi, mencakup :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
  - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
  - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Bagian Umum, mencakup :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
  - b) Sub Bagian Perlengkapan.
  - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup :
  - a) Sub Bagian Protokol.
  - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, mencakup :
  - a) Sub Bagian Perencanaan.
  - b) Sub Bagian Keuangan.
  - c) Sub Bagian Pelaporan

3. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati.

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





## 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pegawai sebanyak 271 orang, yang terdiri dari 140 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 243 Orang Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Harian Lepas (TKS, TKK, THL),

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 7 pegawai, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 3 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing-masing sebanyak 36 yaitu para kepala bagian orang dan 12 orang, kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat PNS, TKS, TKK dan THL yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 94 orang, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 6 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 168 orang, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 5 orang.

## 2.2 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016- 2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel **T.C. 23** dan **T.C. 24** berikut :

**TABEL. TC.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat				60%	3.2985	3.3305	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	-	60%	27,439	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %
2	Persentase batas wilayah Kabupaten yang diselesaikan				0	100%	100%	80%	100%	-	80%	100%	80%	80%	0.00%	80.00%	-100.00%	100.00%	80.00%
3	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pertriwulan				10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	100%	100%	10 Bulan	10 Bulan	10 bulan	80%	50%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	50.00%
4	Persentase Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan				-	-	-	-	75%	-	-	-	-	45.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.44%
5	Persentase Keselarasan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Setda terhadap RPJMD				100%	100%	100%	80%	85%	95%	90%	100%	75%	45.04%	95.00%	90.00%	100.00%	93.75%	52.99%
6	Persentase respon positif kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	-	100%	95%	95%	-	-	100%	80%	75%	0.00%	0.00%	100.00%	84.21%	78.95%
7	Cakupan Pengendalian terhadap Inflasi				4±1%	4±1%	3,5±1%	3,5±1%	3±1%	4±1%	4±1%	3,5±1%	3,5±1%	3,5±1%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %

8	Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tepat Waktu				100%	100%	100%	90%	90%	70%	75%	75%	90%	34%	70.00%	75.00%	75.00%	100.00%	37.78%	
10	Persentase Produk Hukum Daerah yang tidak saling bertentangan						100%	90%	90%	-	-	100%	80%	45%	0.00%	0.00%	100.00%	88.89%	50.00%	
11	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Setda terpenuhi					12Bulan	12Bulan	65%	70%		12Bulan	12 Bulan	65%	34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48.57%	
12	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Jabatan terpenuhi					3 Rmh Dinas 100%	3 Rmh Dinas 100%	80%	85%		3 Rmh Dinas 100%	3 Rmh Dinas 100%	80%	80%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.12%	
13	Indeks Keupasan Layanan Tamu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	100%	100%	78%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
14	Jumlah Investor (PMA/PMDN) yang melakukan investasi di Kab. Tanjab barat = 37 investasi di akhir tahun								100%		-	-	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
15	Tingkat pengangguran terbuka								75%			-		70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.33%	
16	Kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/ asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan								80%			-		75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.75%	



17	Persentase Permasalahan Kasus Lahan yang diselesaikan				100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	60%	25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	41.67%
18	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi				3 Besar	4 Besar	4 Besar	4 Besar	4 Besar	3 Besar	4 Besar	4 Besar	3 Besar	3 Besar	133.33%	100.00%	100.00%	133.33%	133.33 %
19	Indeks Kepuasan Masyarakat				74.50%	74.50%	74.50%	75%	75%	70%	70%	70%	75%	74%	93.96%	93.96%	93.96%	100.00%	98.67%
20	Persentase OPD Kabupaten tepat Ukuran, tepat Fungsi				65%	75%	85%	95%	100%	60%	65%	80%	85%	50%	92.31%	86.67%	94.12%	89.47%	50.00%

**TABEL TC.24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantor	475,422,800	382,625,000	752,615,896	707,045,302	5,770,826,579		335,400,200	681,307,670	652,031,900	4,697,704,996		87,66%	90,53%	92,22%	81,40%	2,022,133,894	1,591,611,192
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					78,000,000					75,682,000					97,03%	19,500,000	18,920,500
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3,064,743,700					2,284,239,353					74,53%	766,185,925	571,059,838
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328,225,000	382,625,000	332,170,000	265,970,000	247,767,900		335,400,200	296,360,000	241,790,000	176,490,000		87,66%	89,22%	90,91%	71,23%	389,189,475	262,510,050
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					718,100,000				709,047,600						98,74%	179,525,000	177,261,900
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55,453,200		172,086,836	172,055,978	170,671,197			166,497,170	166,151,800	165,980			96,75%	96,57%	97,25%	142,566,803	83,203,738
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,778,200					11,778,200					100%					2,944,550	2,944,550
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39,538,250					36,615,500					92,61%	9,884,563	9,153,875
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73,744,600		248,359,060	269,019,324	268,832,602			218,450,500	244,090,100	257,110,800			87,96%	90,73%	95,64%	214,988,897	179,912,850
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman					1,160,508,000					997,082,700					85,92%	290,127,000	249,270,675
	10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					3,319,958,800					2,548,125,414					76,75%	829,989,700	637,031,354
	11 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah					63,870,000					61,185,000					95,8%	15,967,500	15,296,250
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Staf Ahli, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					279,005,000					265,636,079					95,21%	69,751,250	66,409,020
	13 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas					42,001,373					39,293,390					93,55%	10,500,343	9,823,348

	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan/Dinas				46,481,654					45,621,375					98,13%	11,620,414	11,405,344
<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,398,960,000</b>	<b>7,605,387,500</b>	<b>6,706,954,520</b>	<b>7,147,361,000</b>	<b>628,222,400</b>	<b>7,550,774,016</b>	<b>6,247,596,476</b>	<b>6,454,289,218</b>	<b>5,179,894,321</b>		<b>99,28%</b>	<b>93,15%</b>	<b>90,30%</b>	<b>82,45%</b>	<b>6,371,721,355</b>	<b>6,358,138,508</b>
	1	Pembangunan Gedung Kantor	74,900,000	791,800,000		1,587,000,000	310,750,000	1,148,003,000		1,618,400,000	309,119,000		144,99%		101,98%	99,48%	691,112,500	768,880,500
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475,900,000	838,600,000	1,270,642,500	823,600,000	1,429,758,100	1,538,203,125	1,634,858,750	1,243,405,100			183,43%	128,66%	150,97%	92,37%	1,209,625,150	1,104,116,744
	3	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	36,500,000	617,337,500	430,400,000	445,000,000	294,625,000	574,506,875	578,823,640	393,734,000	286,597,044		93,06%	134,49%	88,48%	97,28%	455,965,625	458,415,390
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas					389,000,000				332,030,000					85,35%	97,250,000	83,007,500
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	296,400,000	483,600,000	728,640,000	751,000,000	686,600,000	411,012,038	608,918,351	687,606,350	671,366,723		84,99%	83,57%	91,56%	97,87%	736,560,000	594,725,866
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363,200,000	2,021,660,000	2,216,449,808	2,266,711,000	2,221,311,000	1,238,467,101	1,528,380,690	1,422,553,388	1,438,446,389		61,26%	68,96%	62,76%	64,76%	2,272,332,952	1,406,961,892
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas					288,050,000				190,505,140					66,14%	72,012,500	47,626,285
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,531,760,000	668,450,000	785,548,085	618,650,000	370,624,900	509,313,227	558,367,045	438,586,780	340,091,175		76,19%	71,08%	70,89%	91,76%	993,758,246	461,589,557
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	244,700,000	801,840,000	1,275,274,127	655,400,000	292,105,000	774,956,500	1,338,248,000	650,003,600	291,026,750		96,65%	104,94%	99,18%	99,63%	817,329,782	763,558,713
<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>450,825,000</b>		<b>386,466,000</b>	<b>36,830,000</b>	<b>277,878,000</b>	<b>105,792,000</b>	<b>299,834,000</b>	<b>331,160,500</b>	<b>257,037,000</b>			<b>77,58%</b>	<b>91,78%</b>	<b>92,50%</b>	<b>287,999,750</b>	<b>248,455,875</b>
	1	Peningkatan Manajemen barang milik Daerah	341,300,000		103,466,000	49,750,000		105,792,000	85,725,000	43,882,500				82,85%	88,21%		123,629,000	58,849,875
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	109,525,000		283,000,000	311,080,000	277,878,500		214,109,000	287,278,000	257,037,000			75,66%	92,35%	92,50%	245,370,875	189,606,000
<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah</b>					<b>360,850,000</b>				<b>327,136,000</b>					<b>90,66%</b>	<b>90,212,500</b>	<b>81,784,000</b>
	1	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri					360,850,000				327,136,000					90,66%	90,212,500	81,784,000

5		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Produser</b>					73,936,000					59,119,000					79,96%	18,484,000	14,779,750			
	1	peningkatan Disiplin Pegawai					35,820,000					22,675,000					63,30%	8,955,000	5,668,750			
	2	Pengelolaan administrasi kepegawaian					38,116,000					36,444,000					95,61%	9,529,000	9,111,000			
6		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																-	-			
	1	Rapat kerja cama	35,915,300									22,190,800					61.79%	8,978,825	5,547,700			
	2	Pembinaan Aparatur kecamatan, pemilihan camat teladan tingkat Kab. Tanjung Jabung Barat dan Rapat Koordinasi Camat	271,331,000	324,201,625	240,625,000	130,950,000	192,137,000	226,392,500	296,404,325	211,800,000	107,725,000						83.44%	91.43%	88.02%	82.26%	289,811,156	210,580,456
7		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>					6,550,000					6,550,000					100%	1,637,500	1,637,500			
	1	Pegembangan SDM					6,550,000					6,550,000					100%	1,637,500	1,637,500			
8		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>					48,184,000					44,016,000						12,046,000	11,004,000			
	1	Penyusunan Renstra, IKU, Renja, dan Tapkin Setda Kab. Tanjab Barat					39,021,500					35,508,500					91%	9,755,375	8,877,125			
	2	penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi setda tanjab barat					9,162,500					8,507,500					100%	2,290,625	2,126,875			
9		<b>program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																-	-			
	1	Penyusunan laporan dan pengendalian keuangan sekretariat daerah					44,232,500					44,232,475					100%	11,058,125	11,058,119			
10		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	2,776,328,000	2,530,016,000	2,671,418,250	3,325,490,000	3,320,685,000	2,750,321,995	2,527,265,706	2,665,291,500	3,312,473,700	3,320,685,000	99%	100%	100%	100%	100%	3,655,984,313	3,644,009,475			
	1	Penyedia alat tulis kantor	23,881,000									21,617,750					91%					
	2	Peningkatan mutu dan Program siaran RSPD Tanjung Jabung Barat	235,125,000									223,310,048					95%					
	3	peningkatan SDM, Mutu siaran Tungkal Televisi	291,048,000									280,518,891					96%					

	4	Media cetak dan Elektronik	409,990,000					409,531,406					100%					
	5	Informasi Publikasi	1,604,464,000					1,604,300,650					100%					
	6	Data dan Dokumentasi	211,820,000					211,043,250					100%					
11		<b>Program Layanan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>4,006,594,000</b>	<b>3,237,388,250</b>			<b>4,006,150,750</b>	<b>3,231,388,250</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>				
12		<b>Program Dokumentasi dan Informasi</b>		<b>1,144,940,000</b>	<b>462,731,800</b>			<b>1,142,632,456</b>	<b>462,605,000</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>				
	1	Kegiatan Layanan Komunikasi Pimpinan				524,180,000	796,730,000			523,180,000	796,730,000			100%	100%	330,227,500	329,977,500	
	2	Kegiatan peningkatan kerjasama langganan informasi				151,826,000	223,370,000			151,820,000	223,370,000			100%	100%	93,799,000	93,797,500	
	3	Kegiatan peningkatan dan publikasi informasi				3,089,964,000	3,134,420,000			3,089,964,000	3,134,420,000			100%	100%	1,556,096,000	1,556,096,000	
	4	Kegiatan Dokumentasi dan Informasi				34,860,000	46,650,000			34,810,000	46,650,000			100%	100%	20,377,500	20,365,000	
	5	Kegiatan peningkatan kemitraan media				101,390,000	141,390,000			101,140,000	141,390,000			100%	100%	60,695,000	60,632,500	
	6	Kegiatan Operasional keprotokolan				94,460,000	51,560,000			82,749,750	51,560,000			100%	100%	36,505,000	33,577,438	
13		<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan proses pengawasan</b>																
	1	Kerjasama Antar Daerah		100,620,000	150,650,000	84,450,000	58,150,000		57,235,814	140,150,000	77,450,000		56.88%	93.03%	91.71%	98,467,500	68,708,954	
14		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>																
	1	Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan Usaha BUMD	79,947,500	307,878,500	118,171,000		40,260,000	76,703,200	276,637,900	112,571,000		40,260,000	96%	90%	95%	100%	136,564,250	126,543,025
15		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH</b>					<b>1,180,065,031</b>				<b>926,612,043</b>					295,016,258	231,653,011	
	1	Penerimaan KUNKER Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/ Non Departemen/Luar Negeri					135,000,000				67.97%					33,750,000	-	
	2	Kunker/inspeksi KDH/WKDH					135,000,000				91,762,998					33,750,000	22,940,750	
	3	Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya					1,045,065,031				834,849,045				79.88%	261,266,258	208,712,261	

26		<b>Program Pengembangan wilayah Perbatasan</b>																	-	-
	1	Rencana Penata dan Penegasan batas daerah kabupaten	214,010,000	271,763,750	280,560,000	192,020,000	174,070,000	175,353,470	182,999,250	243,433,000	61,530,000		81,94%	67,34%	86,77%	32,04%			283,105,938	165,828,930
	2	Pembinaan dan pemakuan nama rupa bumi unsur buatan dalam kab. Tarjab Barat	153,700,000	148,650,000	99,540,000	31,042,400	24,362,400	136,878,900	105,017,083	96,290,000	21,437,400		89,06%	70,65%	96,73%	69,06%			114,323,700	89,905,846
27		<b>Program peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>																	-	-
	1	Peningkatan Manajemen barang milik Daerah					46,000,000						38,165,000				82,97%		11,500,000	-
18		<b>Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>438,950,450</b>	<b>943,435,800</b>	<b>649,193,000</b>	<b>637,343,500</b>	<b>755,000,000</b>	<b>391,730,280</b>	<b>668,270,319</b>	<b>571,373,500</b>	<b>241,737,000</b>	<b>216,137,000</b>	<b>89,24%</b>	<b>70,83%</b>	<b>88,01%</b>	<b>33,63%</b>	<b>28,63%</b>		855,980,688	522,312,025
	1	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perikanan	119,800,450	126,450,000	79,114,500	83,114,500	100,000,000	101,942,300	93,302,100	69,464,500	31,415,000	31,960,000	85,09%	73,79%	87,80%	37,80%	31,96%		127,119,863	82,020,975
	2	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	146,500,000	91,131,000	91,131,000	110,000,000	110,000,000		102,432,709	77,531,000	32,828,000	33,877,000		69,92%	85,08%	96,33%	30,80%		137,190,500	61,667,177
	3	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Perternakan	105,700,000	202,043,000	83,272,500	130,275,000	150,000,000	96,853,700	142,935,641	73,172,500	39,239,500	44,064,500	91,63%	70,75%	87,87%	30,12%	29,38%		167,822,625	99,066,460
	5	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup	98,100,000	171,500,000	107,115,500	136,115,500	145,000,000	88,277,400	107,991,831	89,365,500	41,416,000	36,366,000	89,99%	62,97%	83,43%	30,43%	97,98%		164,457,750	90,854,183
	6	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Air		69,899,800	66,557,500	66,557,500	100,000,000		29,837,100	61,057,500	24,497,500	24,497,500		42,69%	91,74%	36,81%	99,29%		75,753,700	34,972,400
	7	Kegiatan pengadministrasikan sumber daya alam			137,850,000					124,630,000					90,41%				34,462,500	31,157,500
19		<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				<b>241,050,000</b>	<b>154,852,000</b>				<b>210,435,950</b>	<b>114,300,000</b>				<b>73,81%</b>	<b>73,81%</b>		98,975,500	81,183,988
	1	Kegiatan Maintenance Perangkat LPSE				75,000,000	75,000,000				56,760,000	64,100,000				75,68%	85,47%		37,500,000	30,215,000
	2	Kegiatan Sekretariat LPSE				166,050,000	79,852,000				153,675,950	77,600,000				92,55%	97,18%		61,475,500	57,818,988

20		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>				2,041,775,000	860,087,000				1,820,980,800	625,857,500			89,19%	72,77%	725,465,500	611,709,575	
	1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				77,600,000	67,190,000				36,500,000	42,115,000			47,04%	62,68%	36,197,500	19,653,750	
	2	Unit layanan Pengadaan				1,814,275,000	862,497,000				1,664,100,000	725,575,000			91,72%	84,12%	669,193,000	597,418,750	
	3	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Anggota Kelompok Kerja/Pokja ULP Kab. Tanjab barat				149,900,000	30,400,000				120,380,800				89,31%		45,075,000	30,095,200	
21		<b>Program Ketahanan Ekonomi</b>		458,664,000	59,359,200	134,052,500	114,350,000		408,451,700	535,442,000	120,568,000	111,910,000					191,606,425	294,092,925	
	1	Koordinasi Program Peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Barat		198,928,500	132,133,500	40,821,000	34,500,000		179,960,700	106,933,500	35,048,500	32,660,000		90%	81%	86%	95%	101,595,750	88,650,675
	2	Penyaluran dan pengembalian Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		76,578,500	71,284,500	21,663,000	19,250,000		69,373,500	68,134,500	20,625,000	19,250,000		91%	96%	95%	100%	47,194,000	44,345,750
	3	Pengawasan dan Pengendalian inflasi Daerah		105,678,500	193,110,000	40,385,000	33,500,000		93,722,000	174,560,000	35,607,500	33,500,000		89%	90%	88%	100%	93,168,375	84,347,375
	4	penyaluran Raskin		77,478,500	78,130,500				65,395,500	76,430,500				84%	98%			38,902,250	35,456,500
	5	Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi			118,933,500	31,183,500	27,100,000			109,383,500	29,286,000	26,500,000			92%	94%	98%	44,304,250	41,292,375
22		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																-	-
	1	Pembinaan Hukum di Daerah																-	-
	2	Kodifikasi perda dan Pelayanan Umum																-	-
	3	Ranham																-	-
23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>																-	-
	1	Jumlah produk hukum yang disebarluaskan	133,475,000	177,570,000	167,247,120	148,125,000	144,275,000	129,393,500	175,089,000	167,124,120	144,565,000	144,275,000	97%	98,60%	99,90%	97,60%		192,673,030	190,111,655

	2	Jumlah Ranperda dan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	230,475,000	279,085,000	251,371,600	45,031,000	50,466,000	221,825,000	274,572,141	251,071,600	43,831,000	50,466,000	96,25%	98,38%	99,88%	97,34%	214,107,150	210,441,435	
	3	Penanganan Perkara Hukum	208,225,000	320,100,000	283,991,200	235,735,070	235,735,070	205,463,330	311,806,200	283,660,000	202,205,000	175,735,000	99%	95,88%	99,88%	98,28%	320,946,585	294,717,383	
	4	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi perundang-undangan		91,605,000	97,301,200	174,700,000			86,890,000	97,301,200	174,700,000		96,36%	100%	100%		90,901,550	89,722,800	
	5	Jumlah Laporan Investarisasi data kegiatan RANHAM	88,875,000	183,070,000	237,698,180	95,810,000	136,315,000	88,754,000	178,851,000	237,408,180	95,810,000	136,315,000	97,70%	97,70%	99,88%	100%	185,442,045	184,284,545	
24		<b>Program peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>																	
	1	Kegiatan Kerjasama antar daerah					104,971,000					104,601,800					99,64%	26,242,750	26,150,450
26		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>																	
	1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah/pemerintah daerah dan dengan perguruan tinggi					56,488,200					56,355,904					99,76%	14,122,050	14,088,976
27		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	1,422,900,000	5,521,948,000	3,822,442,000	680,948,000	426,264,000	1,285,314,140	2,664,645,798	2,173,834,500	473,331,500	356,162,000	90%	48%	57%	70%	84%	2,968,625,500	1,738,321,985
	1	Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan	253,369,000		101,235,000	52,335,000	82,495,000	185,595,000		211,485,000	51,555,000	64,158,000	73%		209%	99%	78%	122,358,500	128,198,250
	2	Pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan Kab. Tanjab Barat		144,935,000	146,565,000	64,665,000	63,776,000		124,370,761	133,315,000	59,302,000	45,051,000		86%	91%	92%	71%	104,985,250	90,509,690
	3	Penyusunan Renstra, IKU, Renja, dan Tapkin Setda Kab. Tanjab Barat			111,020,000	39,220,000	39,021,500			106,370,000	38,503,000				96%	98%		47,315,375	36,218,250
	4	Penyusunan Buku Data Proyek Fisik Kab. Tanjab Barat			49,875,000	25,000,000	15,460,000			47,110,000	22,145,000	12,695,000			94%	89%	82%	22,583,750	20,487,500



5	Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Kab. Tanjab Barat		161,100,000	101,988,000	46,238,000	54,458,000		110,762,900	95,138,000	39,750,000	45,583,000		69%	93%	86%	84%	90,946,000	72,808,475
6	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Anggota Kelompok Kerja/Pokja ULP Kab. Tanjab barat		79,970,000	65,650,000	74,950,000	63,125,657	38,061,000						79%	58%			70,923,914	9,515,250
7	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) Setda Kab. Tanjab Barat		56,000,000	35,840,000	13,540,000			24,975,000	30,806,000	11,740,000			45%	86%	87%		26,345,000	16,880,250
8	Penyusunan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			144,800,000	77,600,000				105,276,500					73%			55,600,000	26,319,125
9	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kab. Tanjung Jabung Barat				50,300,000	43,475,000				46,250,000	38,350,000						23,443,750	21,150,000
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan		300,518,000	219,970,000	171,170,000	166,600,000		304,833,398	176,132,000	154,426,500	150,325,000		101%	80%	90%	90%	214,564,500	196,429,225
11	Kegiatan Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan serta pelatihan penyusun LPPK		187,100,000	55,555,000	65,930,000			117,075,000		49,660,000			63%		75%		77,146,250	41,683,750
12	Kegiatan pelaksanaan Outcome Pelaksanaan Pembangunan Kab. Tanjab Barat		128,490,000	101,999,000				108,887,200	89,299,900				85%	88%			57,622,250	49,546,775
13	Peningkatan disiplin pegawai			158,445,000	58,035,000				147,380,000	57,100,000				93%	98%		54,120,000	51,120,000
14	Evaluasi SOP				37,900,000	30,100,000				31,817,500	29,525,000				84%	100%	17,000,000	15,335,625
15	Peningkatan Pelayanan Publik	178,750,000	147,575,000	83,740,000	101,425,000	65,675,000	177,388,450	141,753,350	80,857,000	98,255,000	64,490,000	99%	96%	97%	97%	98%	144,291,250	140,685,950
16	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	837,231,000	4,361,050,000	2,687,945,000			791,250,290	1,739,502,882	1,140,842,000			95%	40%	42%			1,971,556,500	917,898,793
20	Peningkatan Ketatalaksanaan		96,200,000	34,285,000	35,400,000	33,600,000		88,867,000	29,828,000	32,950,000	31,950,000		92%	87%	93%	100%	49,871,250	45,898,750
21	Penyusunan laporan standar pelayanan minimal					22,100,000											5,525,000	-
23	kegiatan Bintek SOP			55,335,000					42,175,000					78%			13,833,750	10,543,750

	24	Kegiatan Penyusunan SPM	38,125,000	44,825,000	72,600,000	21,200,000		35,325,000	36,495,300	69,945,000	18,750,000		93%	81%	96%	88%		44,187,500	40,128,825
	25	Penyusunan Evaluasi Jabatan			93,400,000	23,100,000				92,475,000	21,830,000				99%	95%		29,125,000	28,576,250
27		<b>Program Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																-	-
	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	47,736,500					39,609,500					82.98%					11,934,125	9,902,375
28		<b>Program Keagamaan dan Kemasyarakatan</b>																-	-
	1	Peningkatan Syiar Nilai-nilai Keagamaan		438,816,500	406,070,200	524,423,000	204,288,000		197,521,600	315,823,721	377,289,100	55,415,000		45,01%	77,78%	71,94%	27,13%	393,399,425	236,512,355
	2	Amaliyah Ramadhan dan Dua hari Raya	136,509,000	155,470,000	134,255,000	111,005,000	7,610,000	136,509,000	140,572,000	130,950,000	105,990,000	1,650,000	100%	90,42%	97,54%	95,48%	21,68%	136,212,250	128,917,750
	3	Perangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji seta Pengiriman TKHD	209,889,000	348,445,000	397,060,000	334,510,000		209,889,000	247,389,000	236,195,000	310,830,304		100%	71%	59,49%	92,92%		322,476,000	251,075,826
	4	Festival Anak Shaleh	381,285,018	459,268,200	295,856,744	369,235,000	14,770,000	381,285,018	288,741,200	261,076,708	346,072,600	14,070,000	100%	62,87%	88,24%	93,72%	95,26%	380,103,741	322,811,382
	5	Training Centre (TC) MTQ	724,182,000	863,720,000	783,152,400	878,126,500	12,000,000	724,182,000	827,265,100	735,111,890	777,045,100	12,000,000	100%	95,78%	93,87%	88,49%	100%	815,295,225	768,901,023
	6	Pembinaan Da'i Pedesaan/Kelurahan	1,495,961,000	1,894,300,000	1,821,100,000	1,670,850,000	1,540,405,000	1,495,961,000	962,050,000	1,442,075,000	1,382,670,000	1,062,975,000	100%	50,79%	79,19%	82,84%	69,01%	2,105,654,000	1,586,432,750
	7	Pembinaan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan	7,143,322,750	7,417,166,300	7,321,200,000	7,261,300,000	7,058,350,000	7,143,322,750	7,168,169,000	7,206,550,000	6,918,100,000	5,641,975,000	100%	96,64%	98,43%	95,27%	79,93%	9,050,334,763	8,519,529,188
	8	Kafilah MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,165,423,500	1,399,975,300	1,545,127,276	1,633,795,000	17,500,000	1,165,423,500	1,296,524,670	1,447,676,276	1,471,206,300	17,500,000	100%	92,61%	93,69%	90,05%	100%	1,440,455,269	1,349,582,687
	9	Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan Sekretariat Tim Pembinaan usaha Kesehatan Sekolah	149,844,000	184,280,000	135,992,600	57,868,000	40,368,000	149,844,000	162,465,999	1,269,880,000	51,536,000	27,925,000	100%	88,16%	93,38%	89,06%	69,18%	142,088,150	415,412,750
	10	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah		268,866,000	266,037,500	333,141,000	211,471,000		238,250,600	2,461,120,000	287,049,000	205,296,000		88,61%	92,51%	86,16%	97,08%	269,878,875	797,928,900
	11	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjung Jabung Barat	8,396,199,500	1,640,086,000	1,300,879,000	1,068,176,000	499,169,500	839,619,500	1,321,994,440	1,018,382,900	1,027,543,500	361,993,250	100%	80,61%	78,28%	96,20%	72,52%	3,226,127,500	1,142,383,398
	12	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten	559,174,000	687,939,000	632,828,875	6,558,156,500		559,174,000	621,986,800	571,479,500	638,670,500		100%	90,41%	90,31%	97,04%		2,109,524,594	597,827,700



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis lingkungan Internal (ALI) terhadap aspek kekuatan (*Strength*) dan aspek kelemahan (*Weakness*) dan analisis lingkungan Eksternal (ALE) terhadap aspek Peluang (*Opportunity*) dan aspek hambatan/ ancaman (*Threat*).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang dari sudut Analisis SWOT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

### A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi / satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara rinci faktor internal terdiri dari :

- 1) Kekuatan (*Strength*) ;
  - a. Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tupoksi;
  - b. Tersedianya sumber daya Manusia dalam jumlah yang cukup;
  - c. Adanya kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
  - e. Kemampuan dan kemauan aparatur jajaran Sekretariat Daerah yang cukup tinggi untuk belajar.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) ;
  - a. Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
  - b. Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik;
  - c. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
  - d. Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme teamwork.

## B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan/Ancaman (*Threat*), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh – sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci faktor eksternal terdiri dari :

- 1) Peluang (*Opportunity*) ;
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;
  - c. Adanya peran serta dan dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;
  - d. Semakin kokoh dan meluasnya kebijakan otonomi daerah dan demokratisasi;
- 2) Hambatan / Ancaman (*Threat*) ;
  - a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
  - b. Belum optimal mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - c. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat;
  - d. Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA**

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Masalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

#### **3.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Belum adanya SDM perancang produk hukum daerah;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.



Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

#### d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### **3.2 Telaahan Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah**

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Tanjung Jabung Barat Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong

bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### 1. **Visi**

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarakan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

**“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**  
***(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)***

**Berkualitas**, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

**Ekonomi maju**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

**Religius**, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

**Kompetitif**, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.

**Aman**, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

**Harmonis**, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

## 2. **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Penjelasan :

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

- Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik  
Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan  
Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.
- Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota  
Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

**MATRIK PENJABARAN VISI BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2021-2024**

**“TANJAB BARAT BERKAH”**

Tanjung Jabung Barat yang *“Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis”*

NO.	VISI	INDIKATOR	Sasaran RPJMD	RENSTRA
A.	BERKUALITAS			
1.	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat	1. IPM (indeks Pembangunan Manusia)	✓	
		2. IPG (indeks pengembangan Gender)	✓	✓
		3. IDG (indeks Pemberdayaan Gender)	✓	✓
		4. Angka Kematian Ibu (AKI)		✓
		5. Angka Kematian Bayi (AKB)		✓
		6. Angka Kematian Balita (AKABA)		✓
		7. Persentase Drop Out Keluarga Berencana		✓
		8. Angka Kemiskinan	✓	
		9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	✓	✓
		10. Harapan Lama Sekolah (tahun)	✓	✓
B.	EKONOMI MAJU			
1.	Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup	1. Pertumbuhan Ekonomi	✓	
		2. Pengeluaran riil Perkapita (Rp.000)	✓	
		3. Tingkat Pengangguran terbuka (%)	✓	✓
		4. Pertumbuhan Ekspor (%/th)		✓
		5. Realisasi ekspor (%/th)		✓
		6. Realisasi PMA dan PMDN (Rp.Juta)		✓
		7. Peningkatan PDRB per Kapita (Rp Ribu)	✓	
		8. Laju Inflasi (%)	✓	
		9. Indeks Gini (ketimpangan ekonomi)	✓	
		10. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (%)		✓
		11. Tingkat pemerataan perekonomian (%)		
		12. Tingkat keterpeliharaan kelestarian alam	✓	✓
		13. Tingkat keterpeliharaan lingkungan hidup		

C.	RELIGIUS			
	Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan	1. Tingkat Buta Aksara Al Qur.an		✓
		2. Tingkat pemberdayaan pengelola rumah ibadah		✓
		3. Tingkat kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama		✓
		4. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan Aktivitas Keagamaan masyarakat		✓
		5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan keagamaan aparatur		✓
D.	KOMPETITIF			
	Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat <b>menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki</b> untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan	1. Tingkat pemberdayaan dan Pengembangan Sentra Ekonomi daerah		✓
		2. Tingkat nilai jual produk-produk UMKM		✓
		3. Tingkat pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif		✓
		4. Tingkat Produksi hasil Sumber Daya Daerah		✓
		5. Tingkat ketersediaan infrastruktur sebagai daya dukung daya saing daerah		✓
E.	AMAN			
	Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan inprastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Tingkat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		✓
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
		3. Tingkat penyelesaian konflik		
		4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga iklim investasi		
F.	HARMONIS			
	Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama	1. Tingkat sinergisitas program pembangunan daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.		✓
		2. Tingkat sinergisitas antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah		
		3. Tingkat sinergisitas antar OPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa.		
		4. Tingkat Kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya.		
		5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan kearifan local		

**MATRIK PENJABARAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2021-2024**

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Pengembangan Budaya Religius 2. Pengembangan Budaya Demokratis	1. Aparatur Pemerintah 2. Masyarakat	1. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 2. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 3. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	1. Koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi implementasi perda 2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD 3. Penyelesaian sengketa	Bag. Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 3. Fasilitasi Bantuan Hukum
	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Aparatur Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	1. Tidak adanya peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif. 2. Program pencegahan pelanggaran hukum dalam masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	Evaluasi perda Sosialisasi, advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi, advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	a. Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	2. Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	- Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bagian ADP	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan



MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	a.Aparatur b.Pemerintah BUMD c.BUMDES	a. Adanya manajemen yang baik dalam kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes. b. Adanya pembinaan manajemen pengelolaan yang baik pada BUMDes. c. Adanya kerjasama antara BUMD dengan BUMDes.	Sistem fit dan proper test untuk pimpinan dan pengelola BUMD, pelatihan pengelola BUMDes  Kerjasama	Bag. Perekonomian  Bag. Kerjasama	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat	Program perekonomian dan pembangunan	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat	Masyarakat	1.Meningkatnya persentase hasil pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat.	Mengaktifkan lifting migas, pertemuan berkala dengan usaha pertambangan, pemanfaatan partisipasi interest, update data produksi dan lifting migas, TJSPL Migas	Bag. Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Pemberdayaan Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.OPD 2.Koperasi 3.UMKM	1.Bertumbuhnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2.Adanya inovatif dari OPD terkait dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Bantuan modal usaha, pelatihan manajemen, inovasi usaha, penguatan evaluasi dan pengawasan, peningkatan kerjasama,	Bag. Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas		Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas	1.OPD 2.Swasta	1.Adanya Inovasi OPD terkait dalam meningkatkan Investasi dan Ekspor Non-Migas.	Melakukan inovasi dalam substansi kegiatan peningkatan Investasi dan	Bag Perekonomian	

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan Berkhak.	a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	gram pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Mengaktifkan Kegiatan Keagamaan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama Yang Baik dan Benar	1. Masyarakat 2. Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya Partisipasi aparatur dalam kegiatan keagamaan	Pengajian, sholat berjamaah, bakti sosial, sosialisasi (aparatur)	Kesra,	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
					2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengamalan agamanya masing-masing	Pengajian, sholat berjamaah, bakti social, sosialisasi (masyarakat)	Kesra,	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
			2. Peningkatan Kualitas, Penyebaran dan Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji.	1. Da'i/ Muballigh, 2. Imam Masjid, 3. Bilal dan 4. Guru Ngaji	1. Meningkatnya SDM Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji 2. Penyebaran Da'i/ Muballigh sesuai dengan kebutuhan wilayah 3. Meningkatnya Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji	Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi  Penambahan jumlah / sebaran da'l dst.  Meningkatkan besaran honorarium dai dst.	Kesra  Kesra  Kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
			3. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama.	1. Pendidikan Agama 2. Guru Agama jenjang SD dan SMP	1. Terlibatnya pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama 2. Meningkatkan kualitas SDM guru agama jenjang	Mata pelajaran agama, muatan lokal agama  Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi	kesra  kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

					SD dan SMP			
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4. Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	- Pesantren dan Madrasah	Terlibatnya pemerintah daerah dalam Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	Fasilitasi dan koordinasi	kesra,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tenram, Tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi penyelesaian konflik	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hasil Pertambangan dan Migas bagi kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan melakukan gerakan hijau		Perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan	OPD Masyarakat	Terlaksananya dan Koordinasi dalam melakukan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Pemerataan Pengembangan Daerah dari Desa sampai ke Kota	Sinergisitas antara Derah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada masyarakat		Sinergisitas antara daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	OPD	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dalam sinergisitas antara Daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	ilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	-Pengembangan Budaya Religius -Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag. Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	1. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		1.Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Transparansi pada peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam preoses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat.	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag. Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	2. Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur		1. Adanya Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur	1.Aparatur Pemerintah	1. Penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya system terbuka penempatan aparatur 3. Penempatan aparatur didasarkan pada tingkat prilaku/moral, pedidikan, masa kerja, kompetensi, Pendidikan dan pelatihan/diklat, kepangkatan.	Berpedoman pada anjab dan evjab	Bag Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman, berakhlak mulia	Peningkatan Kualitas pendidikan masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan mutu Pendidikan Dasar, menengah dan perguruan Tinggi	1.Pendidikan Dasar 2.Guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar 3.Pendidikan menengah 4.Perguruan Tinggi	Terlibatnya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan menengah dan perguruan tinggi	Koordinasi fasilitasi, dan kerjasama (beasiswa, pertukaran pelajar)	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram tertib dan demokratis	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.Aparatur pemerintah 2.Masyarakat 3.Kelompok masyarakat	Sinergitas program antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum	Rumah perlindungan saksi dan korban, sosialisasi penguatan peran RT/lingkungan kerjasama, aksi bersama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang baik ( <i>Good Governance</i> ) untuk pelayanan publik	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	1.Aparatur pemerintah 2.BUMD 3.BUMDes	Adanya kerjasama antara BUMD dan BUMDes	Kerjasama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
<b>Misi 3</b>	Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat		Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat	1.OPD 2.Aparatur Pemerintah	Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan ramah	Implementasi aplikasi pelayanan publik, penyederhanaan proses birokrasi peningkatan kompetensi, briefing secara rutin	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
4. Pemerataan pembangunan	Pemenuhan kebutuhan		Pemenuhan kebutuhan	1.OPD terkait	Adanya inovasi dan strategi OPD terkait dalam	Koordinasi dan fasilitasi ke K/L	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama

Daerah dari Desa sampai kota	telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower		telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower		pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower	alternatif akses telekomunikasi ke desa.		daerah
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	a. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Terbentuk dan tersedianya system  2. Tersedianya Perangkat  3. SDM Aparatur	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Kominfo Bag. PBJ  Bagian Umum/Perlengkapan Setda  Bagian Umum/Kepegawian Setda	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	b. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )		Peningkatan Efisiensi, Efektif dan Ramah dalam Melayani Masyarakat.	1.OPD 2.Aparatur pemerintah	1.Rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat, rumah singgah, tempat dialog	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan	Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan		Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja	1.OPD 2.Masyarakat	Integrasi rumah dinas dengan promosi produk industri rumah tangga	Integrasi rumah dengan promosi produk industri rumah	Bag Umum/Rumah Tangga,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Ekonomi Kerakyatan	Kerja					tangga		Urusan Pemerintahan Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
1.Mewujudkan kondisi Sosial yang tentram, tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	-Aparatur Pemerintahan -Kelompok Masyarakat -Masyarakat Umumnya	-Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	-Aktifnya siskamling dan Petugas Linmas	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi
2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Melakukan Upaya penyelesaian Tapal Batas	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	-Melakukan upaya Penyelesaian Tapal Batas	-OPD -Masyarakat	-Adanya Strategi baru dalam upaya penyelesaian Tapal Batas  -Adanya Partisipasi Masyarakat dalam upaya penyelesaian Tapal Batas	-Pembentukan Tim Percepatan penyelesaian Tapal Batas, Meningkatkan koordinasi  -Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam tim percepatan penyelesaian tapal batas dalam rapat-rapat koordinasi	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
		Program perekonomian dan pembangunan			1.Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag.PBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang	a. Penggunaan Teknologi Informasi		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Terbentuk dan tersedianya sistem 2. Tersedianya	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan	Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan

Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )		Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )		Perangkat 3. SDM Aparatur 4. Kesiapan jaringan, 5. Efisiensi pengelolaan, 6. Layanan online, 7. Portal daerah, 8. Government CIO (chief information officer) 9. Promosi e-government, 10. E-participation, 11. Open government, 12. Cyber Security 13. Tercipta Kepercayaan 14. Adanya reliabilitas 15. Dukungan kepada masyarakat yang perlu diakomodir dalam kebijakan e-government	<i>E-Government</i>		secara Elektronik
	b. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		- Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	- OPD - Aparatur OPD	1. Tingkat keterbukaan pada proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Transparansi pada peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Transparansi melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag.PBJ  Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik  Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik



### **3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Menjadikan rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat
2. Mengaktifkan kegiatan keagamaan, meningkatkan sarana prasarana ibadah serta meningkatkan kualitas, penyebaran dan kesejahteraan da'i imam masjid, bilal dan guru ngaji sehingga terbangunnya budaya religius
3. Memberikan biaya siswa pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3
4. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik, tower, air bersih dan kawasan potensial yang sulit dijangkau pembangunan serta hilirisasi industri.
5. Pemeberdayaan dan pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasisi rumah ibadah dan kelompok keagamaan.
6. Melakukan gerakan masyarakat sadar stunting (gemasting), peningkatan biaya operasional pukesmas untuk pelayanan masyarakat kurang mampu, serta penyediaan ambulance air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Membentuk dan mendorong milenia enterpreuner movement (Memo) agar warga Tanjung Jabung Barat memiliki mental berwiraswasta yang inovatif dan bersaing di era industri 4.0
8. Membuat cetak sawah, pembelian bibit dan pupuk secara berkala dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa menuju swasembada
9. Optimalisasi balai pelatihan kerja dalam menjawab kebutuhan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Meningkatkan kinerja birokrasi, membentuk lembaga pengaduan masyarakat dalam rangka percepatan penyelesaian konflik lahan di Kabuapten Tanjung Jabung Barat

#### 4. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

Pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Berdasarkan Misi dan Tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Sekretariat Daerah Mengacu Kepada Misi Ke 4 : *"Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik"*.

### 3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yaitu **JAMBI MANTAP**, yakni :

***“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT”***

Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih dan melayani dengan didukung e-goverment yang terintegrasi.
2. Memantapkan kualitas infrastruktur Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan, Pembinaan dan pengelolaan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berbasis agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan perekonomian daerah, pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim .
5. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yang berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, social budaya dan kesetaraan gender .

Tabel. V

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Sasaran pada Renstra Provinsi Jambi	Sasaran pada Kementerian Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah dokumen perencanaan Setda	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas.	Meningkatnya pelayanan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
2	Frekuensi pengelolaan keuangan Setda dan Pimpinan			
3	Pengelolaan keuangan Setda dan pimpinan			
4	Terlaksananya Penyusunan laporan akuntabilitas daerah kinerja instansi Setda dan penyusunan laporan pengendalian keuangan Setda			
5	persentase koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, kunker/inspeksi KDH/WKDH			
6	Aset tercatat dengan akurat			
7	Persentase fasilitasi pakaian dinas aparatur sipil negara	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
8	Persentase fasilitasi koordinasi kegiatan dalam dan luar daerah (kegiatan administrasi kepegawaian, kegiatan disiplin pegawai ,kegiatan jasa administrasi staf ahli )			
9	Persentase belanja kursus nasional dan sosialisasi serta bimtek bagi apartur pemerintah			
10	Persentase layanan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas			
11	Persentase fasilitasi peralatan rumah dinas/jabatan			
12	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas			
13	Persentase pendistribusian dan pengelolaan surat masuk dan keluar Setda			
14	Persentase pasilitasi			

	pemeliharaan gedung kantor			
15	Persentase pengelola surat masuk dan surat keluar Setda			
16	Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara			
17	Persentase fasilitasi pelayan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
18	Persentase Ruang Kerja dalam Kondisi Bersih			
19	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional dalam Keadaan Baik			
20	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara			
21	Persentase peralatan gedung kantor berfungsi baik			
22	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			
23	Persentase peralatan gedung kantor berfungsi baik			
24	Jumlah Regulasi Kelembagaan			
25	Jumlah tersusun nya analisis jabatan dan analisis beban kerja.			
26	Jumlah Regulasi Kebijakan Ketatalaksanaan			
27	Jumlah Tersusun nya Laporan Operasional Prosedur			
28	persentase kepuasan masyarakat			
29	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Jumlah Laporan pelaksanaan repormasi, Birokrasi daerah			
30	Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah			
32	jumlah media jurnal/surat kabar/majalah yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah			
33	frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah, jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital dan sewa billboard area bandara			
34	Jumlah laporan administrasi pemerintahan daerah dan Jumlah pelaksanaan event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan dan daerah			
35	Jumlah tanda batas kabupaten, kecamatan, Jumlah laporan			
36	Peringkat capaian Prestasi			
			Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
		Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah		

	Camat teladan/Berprestasi tingkat kabupaten			
37	Kecamatan dengan indeks kepuasan masyarakat kategori baik dan jumlah kelurahan yang menerima dana kelurahan			
38	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah dan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan, Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jamaah Haji, Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat, Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan.		
39	Jumlah Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD			
40	Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Provinsi			
41	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya Di 13 Kecamatan			
42	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan			
43	jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an			
44	Jumlah Penyelesaian Proses Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat di Dua kecamatan			
45	Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ			
46	Jumlah Dai Desa yang diberi pembinaan,	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Ilmu Keagamaan		Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47	Jumlah guru ngaji yang diberi insentif pembinaan			
48	Jumlah Guru agama Imam Mudin dan guru Ngaji Ustad Pengajian Mualaf/Pembinaan ilmu Agama			
49	Jumlah Pertemuan Forum Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah		
50	Keputusan bupati	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat yang agamis, bermoral, serta Harmonis	
51	Peraturan bupati			
52	Peraturan daerah			
53	Penyelesaian sengketa dan pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat			
54	terciptanya aparatur dan masyarakat yang mengerti HAM			
55	Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu			
56	Tertatanya produk hukum daerah yang tertib			
57	Penyusunan kerjasama dalam negeri, penyusunan dokumen MOU dan PKS kerjasama dalam	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah/Lembaga/Perseoran	Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian

	negeri, terlaksana sosialisasi kerjasama dalam negeri dan rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama kab. Tanjab barat	gan Dalam Negeri & Luar Negeri	kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	dalam kebudayaan.
58	Terlaksananya sosialisasi potensi kerjasama tanjung jabung barat melalui forum kerja sama luar negeri dan tersedianya potensi kerjasama luar negeri			
59	Terlaksananya bahan pelaksanaan perumusan kebijakan evaluasi dalam dan luar negeri, terlaksananya evaluasi rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama			
60	Jumlah monitoring, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD Jumlah BUMD yang diberikan subsidi	Terselenggaranya koordinasi penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dengan efektif dan efisien		
61	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah dan Jumlah laporan TPID			
62	Jumlah monitoring pembinaan dan laporan KUPEM			
63	Jumlah monitoring dan laporan penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran			
64	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah		
65	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat			
66	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring		Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
67	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD dan pelaporan laporan tepra melalui sismonteptra			
68	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa			
69	Jumlah pemeliharaan Co. Location,	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif		
70	Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala			
71	Jumlah peserta sosialisasi Dan peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar			
72	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pembangunan, dan	
73	Jumlah Laporan evaluasi			

74	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertambangan dan lingkungan hidup		kerjasama daerah.	
75	Jumlah Laporan evaluasi			
76	Jumlah rapat-rapat koordinasi sumber energi dan air			
77	Jumlah Laporan evaluasi			



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Adapun maksud dari penataan ruang kabupaten yaitu :

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengolahan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kabupaten terdiri atas:

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

### **3.5. Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Misi 3 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik

Adapun tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

NO.	Visi	Misi ke- 3
1.	Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public</p> <p>Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab</p> <p>Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah</p>

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun Ke.....					SUMBER DATA	KET
				1	2	3	4	5		
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1.Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	62,50 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)	68,50 (B)	70,01 (BB)	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN	Sekretaris Daerah
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN	Sekretaris Daerah
			Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	75%	80%	83%	88%	90%	BAGIAN ORGANISASI	Sekretaris Daerah
			Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	80,70	80,80	81,00	85,50	89,00	BAGIAN ORGANISASI	Sekretaris Daerah
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	32	35	40	43	BAGIAN ORGANISASI	Sekretaris Daerah



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun Ke.....					SUMBER DATA	KET
				1	2	3	4	5		
		1.2.Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Sekretaris Daerah
			Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%	87%	90%	95%	98%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Sekretaris Daerah
		1.3. Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN ADP	Sekretaris Daerah
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Sekretaris Daerah
2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN KESRA	Sekretaris Daerah
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	BAGIAN KESRA	Sekretaris Daerah
		2.2. Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN HUKUM	Sekretaris Daerah

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun Ke.....					SUMBER DATA	KET
				1	2	3	4	5		
						2.3. Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	80%		
		2.4. Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PEREKONOMIAN	Sekretaris Daerah
		2.5. Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN SDA	Sekretaris Daerah

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah**  
**Tanjung Jabung Barat**

<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</b>				
<b>Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Bagian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan tata Kelola Keuangan	Sosialisasi/Bimbingan teknis tentang tata kelola keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan	Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah	Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen Perencanaan dan pelaporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah	Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan	asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Menata standar pelayanan administrasi	Penetapan standar pelayanan administrasi	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Umum
		Pembinaan tata naskah dinas	Peningkatan pemahaman tata naskah dinas	Bagian Umum
		Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal	Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Bagian
1	2	3	4	5
		Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik	Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel	Bagian Umum
		Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi	Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Menata standar pelayanan kerumahtangaan	Penetapan standard pelayanan kerumahtangaan	Bagian Umum
		Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumahtangaan secara maksimal	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan	Peningkatan koordinasi dengan pimpinan	Bagian Umum
		Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan	Penetapan standard pelayanan keprotokolan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan	Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja penyusunan	Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi
		Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Desk/asistensi tentang dokumen AKIP	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi	Bagian Organisasi
		Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid	Peningkatan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan seluruh OPD	Bagian Organisasi
		Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi	Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi	Bagian Organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Bagian
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum
		Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Peningkatan penyelesaian penyusunan peraturan Daerah (Perda)	Bagian Hukum
	Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan	Bagian ADP
		Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian ADP
		Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian PBJ
		Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Peningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Bagian PBJ
		Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Bagian PBJ
		Meningkatkan pemberitaan/ Informasi kebijakan strategis Pemerintah kepada Masyarakat	Peningkatkan pemberitaan/ Informasi kebijakan strategis Pemerintah kepada Masyarakat	Semua Bagian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Bagian
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
		Meningkatkan Layanan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Peningkatan Layanan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Meningkatkan kerjasama antar daerah	Peningkatan Kerjasama antar daerah	Bagian Kerjasama
		Menata prosedur administrasi pelaksanaan bersama	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan Kerjasama antar daerah/lembaga dalam negeri dan luar negeri	Bagian Kerjasama
		Monitoring dan evaluasi fasilitasi kerjasama	Rapat koordinasi, fasilitasi, Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait	Bagian Kerjasama
	Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Perekonomian
		Meningkatkan pengendalian Pembangunan perekonomian yang kokoh	Peningkatan pengendalian Pembangunan perekonomian yang kokoh	Bagian Perekonomian
	Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Meningkatkan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	Peningkatan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	Bagian SDA
		Meningkatkan fasilitasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan SDA	Fasilitasi dan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan SDA	Bagian SDA



Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab dan
2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah

maka diperlukan Sasaran Strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif
2. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
3. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat
4. Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5. Meningkatnya Implemantasi kerjasama dalam dan luar negeri
6. Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yagn diimplemntasikan
7. Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah
8. Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam

Selanjutnya Sasaran Strategi dimaksud merupakan dasar dalam perumusan program dan kegiatan serta subkegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab VI Renstra Perangkat Daerah menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan, sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capainya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

- Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber dayapembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan atau sub kegiatan dalam satu program.
- Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Rencana Program,Kegiatan,Subkegiatan dan Pendanaan Setda Kab. Tanjung Barat  
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	60,39 (B)	60,39 (B)	24,686,371,700	62,50 (B)	34,339,734,722	64,50 (B)	37,937,211,319	66,50 (B)	39,733,200,509	68,50 (B)	42,373,254,926	70,01 (BB)	45,174,205,818	100%	224,243,978,994	Perencanaan dan Keuangan
				Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4.01.01.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keberadaan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekda	100%	100%	61,100,000	100%	518,485,000	100%	666,476,000	100%	703,599,750	100%	726,689,463	100%	736,069,463	100%	3,412,419,676	
				Persentase dokumen perencanaan dgn kondisi berkualitas Baik	70%	70%		72%		75%		80%		85%		90%		90%		
				Persentase Dokumen Pelaporan dgn kondisi berkualitas Baik	65%	68%		70%		73%		78%		83%		90%		90%		
		4.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	10 Dokumen	10 Dokumen	61,100,000													61,100,000
				Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen														
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	170,275,000	4 Dokumen	245,191,000	4 Dokumen	250,500,000	4 Dokumen	255,500,000	4 Dokumen	260,250,000	20 Dokumen	1,181,716,000	
		4.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-											
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			1 Dokumen	95,750,000	1 Dokumen	105,325,000	1 Dokumen	110,591,250	1 Dokumen	110,877,963	1 Dokumen	110,877,963	5 Dokumen	533,422,176	
		4.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dok		-		-											
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-			1 Dokumen	85,850,000	1 Dokumen	94,435,000	1 Dokumen	103,878,500	1 Dokumen	109,071,500	1 Dokumen	109,071,500	5 Dokumen	502,306,500	
		4.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Renstra, Dokumen Laporan Pelaksanaan Renja, Dokumen Laporan IKU, Dokumen Laporan Rencana Aksi,	6 Dok	6 Dok	-		-											
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			4 Laporan	92,960,000	4 Laporan	140,510,000	4 Laporan	150,250,000	4 Laporan	155,500,000	4 Laporan	160,125,000	20 Laporan	699,345,000	
		4.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja SKPD, Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan LKPJ	3 Dok		-		-											
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					2 Laporan	73,650,000	2 Laporan	81,015,000	2 Laporan	88,380,000	2 Laporan	95,740,000	2 Laporan	95,745,000	8 Laporan	434,530,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan tersusun dengan baik	100%	100%	17,777,838,700	100%	23,411,937,272	100%	26,465,661,839	100%	27,851,157,431	100%	29,313,077,802	100%	30,860,124,928	100%	155,679,797,972	Perencanaan dan Keuanaan			
				4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	16,732,533,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 Bulan	16,732,533,700	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Org/bln	-	131 Org/Bln	22,072,522,272	132 Org/Bln	24,819,911,839	132 Org/Bln	26,060,907,431	133 Org/Bln	27,363,952,802	133 Org/Bln	28,732,150,443	661 Org/Bln		129,049,444,787		
				4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	63 orang	63 orang	935,305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		63 orang	935,305,000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1 Dokumen	1,079,040,000	1 Dokumen	1,375,000,000	1 Dokumen	1,512,500,000	1 Dokumen	1,663,750,000	1 Dokumen	1,830,125,000	25 Dokumen		7,460,415,000		
				4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	2 laporan	2 laporan	58,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	58,325,000
						Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dok	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1 Dokumen	170,250,000	1 Dokumen	175,500,000	1 Dokumen	180,250,000	1 Dokumen	185,125,000	1 Dokumen	190,125,000	1 Dokumen		901,250,000		
				4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	51,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 Dokumen	51,675,000
						Jumlah dokumen pelaporan setda	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	4 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	2 Dokumen	90,125,000	2 Dokumen	95,250,000	2 Dokumen	97,500,000	2 Dokumen	100,250,000	2 Dokumen	107,724,485	8 Dokumen		490,849,485		
				4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	6,760,008,000	0%	10,239,062,450	12 bulan	10,629,948,480	12 bulan	10,997,943,328	12 bulan	12,147,737,661	12 bulan	13,387,511,427		12 bulan	64,162,211,346	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	10,239,062,450	12 Laporan	10,629,948,480	12 Laporan	10,997,943,328	12 Laporan	12,147,737,661	12 Laporan	13,387,511,427	48 Laporan		57,402,203,346		
				4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	6,760,008,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12 bulan	6,760,008,000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	10,239,062,450	12 Laporan	10,629,948,480	12 Laporan	10,997,943,328	12 Laporan	12,147,737,661	12 Laporan	13,387,511,427	48 Laporan		57,402,203,346		
4.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terkelola dengan Baik	100%	100%	87,425,000	100%	170,250,000	100%	175,125,000	100%	180,500,000	100%	185,750,000	100%	190,500,000	100%	190,500,000	100%	989,550,000				
		Jumlah BMD OPD yang terkelola	1.137 BMD	1.137 BMD	87,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137 BMD	87,425,000					
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	170,250,000	1 Laporan	175,125,000	1 Laporan	180,500,000	1 Laporan	185,750,000	1 Laporan	190,500,000	5 Laporan	902,125,000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	80,66	80,66	16,108,799,058	80,70	31,946,744,766	80,80	37,861,066,047	81,00	39,582,605,792	85,50	41,391,544,349	89,00	53,616,442,468	89,00	220,507,202,480	Bagian Umum		
		4.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penataan administrasi kepegawaian ASN yang up to date	100%	100%	648,918,800	100%	1,208,826,800	100%	1,110,152,100	100%	1,206,567,310	100%	1,297,224,041	100%	1,396,946,445	100%	6,868,635,496			
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	542 stel	542 stel	346,518,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542 stel		346,518,800	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	5 Paket	806,031,800	5 Paket	836,485,300	5 Paket	909,033,830	5 Paket	989,937,213	5 Paket	1,078,930,934	20 Paket	4,620,419,077			
		4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	3 Staf Ahli	3 Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 Staf Ahli	-
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	252,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 Aplikasi	252,400,000
				Jumlah Waktu Fasilitas Makanan dan Minuman Staf Ahli	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 Bulan	-
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	3 Dokumen	330,795,000	3 Dokumen	138,666,800	3 Dokumen	147,533,480	3 Dokumen	157,286,828	3 Dokumen	168,015,511	12 Dokumen	942,297,619			
		4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	15 Orang	2 Orang	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 Orang	50,000,000
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2 Orang	72,000,000	27 Orang	135,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	119 Orang	657,000,000			
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran sekda	100%	100%	3,588,712,435	100%	6,426,533,734	100%	8,368,575,251	100%	8,805,432,776	100%	9,285,976,053	100%	18,814,573,658	100%	55,289,803,907		Bagian Umum	
		4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	259,856,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 Bulan	259,856,864
				Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 Bulan	-
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	302,563,865	1 Paket	932,640,504	1 Paket	1,025,904,554	1 Paket	1,128,495,010	1 Paket	1,241,344,511	4 Paket	4,630,948,444			
		4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	11 Jenis/Item	11 Jenis/Item	438,890,338	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		11 Jenis/Item	438,890,338
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			-	-	2 Paket	497,285,257	2 Paket	947,013,783	2 Paket	1,041,715,161	2 Paket	1,145,886,677	2 Paket	11,260,475,345	8 Paket	14,892,376,223					
4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 Jenis/Item	60 Jenis/Item	895,727,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Jenis/Item	895,727,658			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	3 Paket	1,116,773,108	3 Paket	1,395,021,520	3 Paket	1,434,523,672	3 Paket	1,477,976,039	3 Paket	525,773,643	12 Paket	5,950,067,982					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Proram dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan) kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,948,228,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	1,948,228,220		
				Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	-	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	4,454,200,169	1 Paket	3,831,708,675	1 Paket	3,914,879,543	1 Paket	4,006,367,497	1 Paket	4,107,004,246	4 Paket	20,314,160,130			
		4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetakan (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Pengandaan yang tersedia	7 Jenis/Item	7 Jenis/Item	46,009,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Jenis/Item	46,009,355	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	2 Paket	55,711,335	2 Paket	239,132,469	2 Paket	263,045,716	2 Paket	289,350,287	2 Paket	318,285,316	10 Paket	1,165,525,123			
		4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	2 Laporan	1,023,058,300	2 Laporan	1,125,364,130	2 Laporan	1,237,900,543	2 Laporan	1,361,690,597	6 Laporan	4,748,013,570					
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase pemenuhan kebutuhan layanan sarpras kantor dan rumah dinas sekda, KDH dan KWDH	100%	100%	1,169,530,100	100%	12,683,112,913	100%	9,176,581,010	100%	8,793,639,111	100%	8,413,663,022	100%	9,221,029,324	100%	49,457,555,480	
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	12 Unit	8,873,368,493	12 Unit	6,716,000,000	14 Unit	6,187,000,000	12 Unit	5,706,360,000	10 Unit	6,276,996,000	49 Unit	33,759,724,493			
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	- Jumlah Waktu Pengadaan Mebel yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	911,103,200	2 Paket	952,213,520	2 Paket	997,434,872	2 Paket	1,047,178,359	8 Paket	3,907,929,951					
		4.01.01.2.07.06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	35 Jenis/Item	35 Jenis/Item	1,169,530,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Jenis/Item	1,169,530,100	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			52 Unit	3,809,744,420	50 Unit	1,549,477,810	53 Unit	1,654,425,591	55 Unit	1,709,868,150	63 Unit	1,896,854,965	266 Unit	10,620,370,936					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4,668,505,523	100%	3,581,260,675	100%	5,346,416,500	100%	5,941,045,500	100%	6,485,150,050	100%	7,083,665,056	100%	33,106,043,304	Bagian Umum
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribasian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 bulan	12 bulan	463,425,000		-		-		-		-		-	12 bulan	463,425,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		-	2 Laporan	463,825,000	2 Laporan	610,207,500	2 Laporan	671,228,250	2 Laporan	738,351,075	2 Laporan	812,186,183	8 Laporan	3,295,798,008	
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	12 bulan	12 bulan											12 bulan		12 bulan	
				Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	1,840,500,000		-		-		-		-		1 Tahun	-	1 Tahun	1,840,500,000
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan											12 bulan		12 bulan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		-	3 Laporan	2,147,500,000	3 Laporan	2,199,800,000	3 Laporan	2,399,780,000	3 Laporan	2,619,758,000	3 Laporan	2,861,733,800	12 Laporan	12,228,571,800	
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	1,727,115,000		-		-		-		-		-	12 bulan	1,727,115,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	336,725,000	1 Laporan	620,409,000	1 Laporan	762,437,250	1 Laporan	808,680,975	1 Laporan	859,549,073	8 Laporan	3,387,801,298	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Item	45 Jenis/Item	637,465,523		-		-		-		-		-	45 Jenis/Item	637,465,523	
				Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan												12 Bulan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	633,210,675	1 Laporan	1,916,000,000	1 Laporan	2,107,600,000	1 Laporan	2,318,360,000	1 Laporan	2,550,196,000	4 Laporan	9,525,366,675	
		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	4,970,924,300	100%	6,979,358,750	100%	9,088,385,900	100%	9,827,224,490	100%	10,639,946,939	100%	11,533,941,634	100%	53,039,782,013	
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	88 Unit	88 Unit														
				Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Sipil) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2,624,169,000		-		-		-		-		-			2,624,169,000
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				88 Unit	3,412,849,000	125 Unit	4,088,885,900	145 Unit	4,437,774,490	160 Unit	4,821,551,939	172 Unit	5,243,707,133	172 Unit	22,004,768,462	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Proram dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		'4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebel	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum				
				Jumlah Mebel yang Dipelihara			-		-	313 Unit	170,180,000	325 Unit	177,198,000	330 Unit	184,917,800	335 Unit	193,409,580		335 Unit	725,705,380		
		'4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	12 bulan	12 bulan	691,401,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12 bulan	691,401,800	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				518 Unit	1,320,165,000	600 Unit	1,465,881,500	625 Unit	1,562,469,650	628 Unit	1,668,716,615	632 Unit	1,785,588,277		632 Unit	7,802,821,042		
		'4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1,655,353,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 Gedung	1,655,353,500	
				Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Bangunan	3 Bangunan															3 Bangunan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		-	15 Unit	2,246,344,750	15 Unit	3,363,438,500	15 Unit	3,649,782,350	15 Unit	3,964,760,585	15 Unit	4,311,236,644		75 Unit	17,535,562,829		
		'4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Persentase gaji dan Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	100%	100%	1,062,207,900	100%	1,067,651,894	100%	1,790,233,890	100%	1,879,903,069	100%	1,967,911,455	100%	2,054,446,583		100%	9,822,354,791		
		'4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	2 orang	2 orang	1,062,207,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2 orang	1,062,207,900	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang		-	2 orang	1,067,651,894	2 orang	1,171,084,210	2 orang	1,229,638,421	2 orang	1,291,120,342	2 orang	1,355,676,359		8 orang	6,115,171,226		
'4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah orang yang difasilitasi untuk pakaian Dinas	2 orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			-	-	6 Paket	81,149,680	6 Paket	85,264,648	6 Paket	94,791,113	6 Paket	99,770,224	18 Paket	360,975,665						
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	110,000,000	2 Orang	125,000,000	2 Orang	130,000,000	2 Orang	135,000,000	60Orang	500,000,000						
'4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-Jumlah Waktu Penyediaan Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan																			
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		-	-	2 Orang /Bulan	428,000,000	2 Orang /Bulan	440,000,000	2 Orang /Bulan	452,000,000	2 Orang /Bulan	464,000,000	6 Orang /Bulan	1,784,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		04.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan kerumahtangaan kantor dan rumah dinas sekda, KDH dan KWHDH			-	-	100%	2,980,721,396	100%	3,128,793,536	100%	3,301,672,789	100%	3,511,839,768	100%	12,923,027,489				
		04.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			-															
		04.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			-		3 Paket	1,744,110,000	3 Paket	1,768,521,000	3 Paket	1,805,373,000	3 Paket	1,865,910,000	9 Paket	7,183,914,000				
		04.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
		04.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			-		3 Paket	779,751,889	3 Paket	857,727,078	3 Paket	943,499,786	3 Paket	1,037,849,764	9 Paket	3,618,828,517				
		04.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
		04.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					3 Paket	456,859,507	3 Paket	502,545,458	3 Paket	552,800,003	3 Paket	608,080,004	9 Paket	2,120,284,972				
				Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	100%												100%				
				Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29			29		32		35		40		43		43				
				Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	80.66	80%	403,997,473	80.66	1,190,000,000	80.8	1,309,000,000	81.00	1,439,900,000	85.50	1,583,890,000	89.00	2,383,241,500	89.00	8,310,028,973			
				Nilai AKIP Kabupaten	100%	100%												100%				
				Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	60%	70%		75%		80%		83%		88%		90%		90%				
		4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang menyusun LKPj-IP	100%	100%	403,997,473	100%	1,190,000,000	100%	1,309,000,000	100%	1,439,900,000	100%	1,583,890,000	100%	2,383,241,500	100%	8,310,028,973			
		4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan IKM berpredikat Baik (B)		31 PD		31 PD		34 PD		37 PD		40 PD		44 PD		44 PD				
		4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp									
	4.01.01.2 13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	3 OPD	112,871,156											3 OPD	112,871,156	Bagian Organisasi									
				Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup	3 Perbup																	3 Perbup						
				Jumlah Tersunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen					
				Jumlah Tersunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen					
				Jumlah regulasi kelembagaan	3 regulasi	-																							
				Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen	-																							
				Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	1 Dokumen	-																							
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen			3 Dokumen	375,000,000	3 Dokumen	412,500,000	3 Dokumen	453,750,000	3 Dokumen	499,125,000	3 Dokumen	749,037,500	15 Dokumen			2,489,412,500								
				4.01.01.2 13.02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	124,995,606													100%	124,995,606			
									Jumlah Tersunnya Laporan SOP	25 SOP	25 SOP																	25 SOP	
									Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi	2 Regulasi																		2 Regulasi
									Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen
									Data Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen
									Jumlah dokumen SOP	1 Dokumen	-																		
	Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	1 Laporan	-																										
	Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM	44 OPD	-																										
	Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	1 Regulasi	-																										
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan		465,000,000	4 Laporan	511,500,000		4 Laporan	562,650,000	4 Laporan	618,915,000	4 Laporan	880,806,500	20 Laporan		3,038,871,500								
	4.01.01.2 13.03			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	166,130,711											1 Laporan		166,130,711								
					Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan	1 Laporan															1 Laporan							
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen			2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	385,000,000	2 Dokumen	423,500,000	2 Dokumen	465,850,000	2 Dokumen	753,397,500	10 Dokumen			2,377,747,500							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14		Persentase kegiatan pimpinan yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%	100%	1,799,238,669	100%	2,965,901,736	100%	3,629,171,760	100%	3,925,006,112	100%	4,281,319,334	100%	4,737,583,201	100%	21,338,220,812	Bagian Prokoping			
				Persentase Pengolahan Dokumen laporan kegiatan pimpinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase ketersediaan bahan bacaan pimpinan dan Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase pengolahan data dokumentasi kegiatan pimpinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	177,019,800										12 Bulan	177,019,800				
					Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokumen												1 Dokumen				
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-	-	1 Laporan	425,959,800	1 Laporan	526,871,760	1 Laporan	632,246,112	1 Laporan	758,695,334	1 Laporan	910,434,401	5 Laporan	3,254,207,407				
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	12 Bulan	395,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,488,000			
					Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 media	90 media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan	12 Buah	-																
					Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah	36000 Exp	-																
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	1 Laporan	564,975,000	1 Laporan	702,300,000	1 Laporan	842,760,000	1 Laporan	1,011,312,000	1 Laporan	1,213,574,400	4 Laporan	4,334,921,400				
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	1,226,730,869											12 Bulan	1,226,730,869			
					Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali	16 Kali													16 Kali			
					Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan	12 Bulan																	
					Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian	1 Dokumen																	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	1 Laporan	1,974,966,936	1 Laporan	2,400,000,000	1 Laporan	2,450,000,000	1 Laporan	2,511,312,000	1 Laporan	2,613,574,400	4 Laporan	11,949,853,336				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
2 Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skorr LPPD	3<ST<4	3<ST<4	10,957,607,020	3<ST<4	16,172,761,765	3<ST<4	17,653,900,000	3<ST<4	19,659,800,000	3<ST<4	22,165,190,000	3<ST<4	23,356,296,000	3<ST<4	109,965,554,785	Bagian Tapem		
				Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%	85%		85%		87%		90%		95%		98%		98%				
		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	708,161,695	100%	1,395,000,000	100%	1,571,900,000	100%	1,711,200,000	100%	1,806,400,000	100%	1,846,200,000	100%	1,846,200,000		100%	9,038,861,695
				Persentase Permasalahan batas wilayah yang diselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%						
				Persentase optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	296,879,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan	296,879,780
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Laporan	1 Laporan		-		-		-		-		1 Laporan						
				Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	2 Event (HUT RI & Hari Jadi)	2 Event (HUT RI & Hari Jadi)		-		-		-		-		2 Event (HUT RI & Hari Jadi)						
				Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres	13 Kecamatan	13 Kecamatan		-		-		-		-		13 Kecamatan						
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-		4 Dokumen		550,000,000		4 Dokumen		575,900,000		5 Dokumen		620,000,000			4 Dokumen	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	1 Laporan	1 Laporan	201,711,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan	201,711,500
				Jumlah Tanda Batas Kabupaten	4 Tanda	4 Tanda		-		-		-		4 Tanda								
				Jumlah tanda batas Kecamatan	8 Tanda	8 Tanda		-		-		-		8 Tanda								
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-		1 Dokumen		420,000,000		1 Dokumen		525,500,000		1 Dokumen		580,500,000			1 Dokumen	
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	209,570,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 Kecamatan	209,570,415
Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rakor			1 Kali Rakor	-	-		-		1 Kali Rakor												
Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN	1 Laporan			1 Laporan	-	-		-		1 Laporan												
Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	2 Laporan			2 Laporan	-	-		-		2 Laporan												
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-			-	3 Dokumen	425,000,000		3 Dokumen		470,500,000		3 Dokumen		510,700,000		3 Dokumen		530,500,000		3 Dokumen	540,700,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	4.01.02.2.02		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	-	Juara 3 Besar	8,752,054,088	Juara 3 Besar	12,560,000,000	Juara 3 Besar	13,816,000,000	Juara 3 Besar	15,447,600,000	Juara 3 Besar	17,722,790,000	Juara 3 Besar	18,739,096,000	Juara 3 Besar	87,037,540,088	Bagian KESRA	
				Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	-	100%	8,752,054,088	100%	12,560,000,000	100%	13,816,000,000	100%	15,447,600,000	100%	17,722,790,000	100%	18,739,096,000	100%	87,037,540,088		
				Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			100%
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	26 Cabang Lomba	0	7,996,638,340													26 Cabang Lomba		
			Jumlah Pengajian ASN dan Masyarakat	0	0														48 Kali		
			Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	26 Cabang Lomba	26 Cabang Lomba																156 Cabang Lomba
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sinar Nilai-Nilai Keagamaan	9 Kali Peringatan	9 Kali Peringatan																39 Kali Peringatan
			Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan																18 Kali Pembinaan
			Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	5 Kali Tahapan	5 Kali Tahapan																30 Kali Tahapan
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen			8 Dokumen	8,470,000,000	8 Dokumen	9,317,000,000	8 Dokumen	10,248,700,000	8 Dokumen	11,273,570,000	8 Dokumen	12,400,927,000	32 Dokumen	51,710,197,000			
			Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	2 Lembaga / Badan	2 Lembaga / Badan	724,273,300															2 Lembaga / Badan
Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat			134 Da'i Desa/Kel	134 Da'i Desa/Kel															134 Da'i Desa/Kel		
Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan			200 Orang	200 Orang															200 Orang		
Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan			3545 Orang	3545 Orang															3545 Orang		
Jumlah pelaksanaan festival anak shaleh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi			2 Kali	2 Kali															2 Kali		
Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD			2 kali fasilitasi	2 kali fasilitasi															2 kali fasilitasi		
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-			9 Dokumen	3,560,000,000		9 Dokumen	3,916,000,000	9 Dokumen	4,307,600,000	9 Dokumen	4,738,360,000	9 Dokumen	5,212,196,000	36 Dokumen	21,734,156,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp
2 Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	4.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	2 Kali Rapat	2 Kali Rapat											2 Kali Rapat	736,572,448	Bagian KISRA	
				Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	653 pasang	653 pasang	31,142,448							705,430,000			653 pasang			
				Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	5 Kali	5 Kali														5 Kali
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemuduan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	4 Dokumen	530,000,000	4 Dokumen	583,000,000	4 Dokumen	641,300,000	4 Dokumen	705,430,000	4 Dokumen	775,973,000	16 Dokumen	3,235,703,000			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-					25 Keluarga	125,000,000	25 Keluarga	150,000,000	25 Keluarga	175,000,000	75 Keluarga	450,000,000			
4.01.02.2.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-					25 Keluarga	125,000,000	25 Keluarga	150,000,000	25 Keluarga	175,000,000	75 Keluarga	450,000,000					
Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	-	100%	926,797,269	100%	1,406,000,000	100%	1,381,000,000	100%	1,556,000,000	100%	1,631,000,000	100%	1,706,000,000	100%	8,606,797,269	Bagian Hukum	
			Jumlah Kasus litigasi yg difasilitasi	-	3 Perkara		3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	15 Perkara						
			Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumetasikan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perdu yang diundangkan	10 Perdu	12 Perdu											12 Perdu				
			Jumlah Perbup yang diundangkan	30 Perbup	50 Perbup	488,814,271										50 Perbup	488,814,271			
			Jumlah SK yang diterbitkan	1000 SK	1000 SK												1000 SK			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	526,000,000	4 Dokumen	501,000,000	4 Dokumen	576,000,000	4 Dokumen	601,000,000	4 Dokumen	626,000,000	16 Dokumen	2,830,000,000		
4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	3 Perkara	3 Perkara												3 Perkara				
		Jumlah Laporan Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM	162,838,000											4 Lap.Aksi HAM	162,838,000			
		Jumlah Laporan Kadarhum	-	1 Laporan Kadarhum													1 Laporan Kadarhum			
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	2 Kasus	450,000,000	2 Kasus	425,000,000	2 Kasus	500,000,000	2 Kasus	525,000,000	2 Kasus	550,000,000	8 Kasus	2,450,000,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.01.02.2.03.03	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	-	4 Kali												4 Kali				
				Jumlah Laporan SIDH	1 Laporan SIDH	1 Laporan SIDH												1 Laporan SIDH			
				Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	600 Buku Perda 12 Desa/Kel	600 Buku Perda 12 Desa/Kel														600 Buku Perda 12 Desa/Kel	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	5 Dokumen	430,000,000	5 Dokumen	455,000,000	5 Dokumen	480,000,000	5 Dokumen	505,000,000	5 Dokumen	530,000,000	20 Dokumen	2,400,000,000				
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	80%	80%	570,593,968	80%	811,761,765	83%	885,000,000	86%	945,000,000	89%	1,005,000,000	95%	1,065,000,000	95%	5,282,355,733			
				Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan dalam daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	570,593,968	100%	811,761,765	100%	885,000,000	100%	945,000,000	100%	1,005,000,000	100%	1,065,000,000	100%	5,282,355,733		
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan luar negeri yang terfasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	67 Dok	67 Dok	317,892,065												67 Dok	317,892,065	
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	3 Dokumen	347,892,065	3 Dokumen	380,000,000	3 Dokumen	400,000,000	3 Dokumen	420,000,000	3 Dokumen	440,000,000	12 Dokumen	1,987,892,065				
				Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	3 Dok	3 Dok	146,232,203											3 Dok	146,232,203		
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	320,000,000	2 Dokumen	340,000,000	2 Dokumen	360,000,000	2 Dokumen	380,000,000	10 Dokumen	1,700,000,000						
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	70 Dok	70 Dok	106,469,700											70 Dok	106,469,700				
Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	4.01.03.2.01	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	5 Laporan	163,869,700	5 Laporan	185,000,000	5 Laporan	205,000,000	5 Laporan	225,000,000	5 Laporan	245,000,000	25 Laporan	1,023,869,700					
			Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	100%	100%	8,810,849,686	100%	41,000,350,298	100%	43,110,870,000	100%	36,839,900,000	100%	22,656,390,288	100%	22,767,279,000	100%	175,185,639,272			
			Jumlah BUMD dalam kondisi baik	-	3 BUMD	7,277,477,298	3 BUMD	39,000,000,000	3 BUMD	39,175,000,000	3 BUMD	34,400,000,000	3 BUMD	19,550,000,000	3 BUMD	19,700,000,000	3 BUMD	159,102,477,298			
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT, BPR, Tango Rajo, PT T anjab Sakti, BPD)	-	3 BUMD													3 BUMD				
			Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi ( PDAM Tirta Pengabuan)	-	1 BUMD	7,138,436,500												1 BUMD	7,138,436,500		
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 laporan													1 laporan			
			Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali	4 kali													4 kali			
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	2 Dokumen		2 Dokumen	38,700,000,000	2 Dokumen	35,725,000,000	2 Dokumen	30,700,000,000	2 Dokumen	15,700,000,000	2 Dokumen	15,700,000,000	10 Dokumen	136,525,000,000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	4.01.03.2 01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	4 kali	4 kali	67,357,848											4 kali	67,357,848		
			Jumlah laporan sembako	12 Laporan	12 Laporan												12 Laporan			
			Jumlah laporan TPID	5 Laporan	5 Laporan												5 Laporan			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	1,225,000,000	2 Laporan	1,300,000,000	2 Laporan	1,350,000,000	2 Laporan	1,400,000,000	10 Laporan	5,425,000,000			
	4.01.03.2 01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	12 Laporan	12 laporan	71,682,950												12 Laporan	71,682,950	
			Jumlah laporan Pupuk	4 Laporan	4 laporan												4 Laporan			
			Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	4 Kali	4 kali												4 Kali			
			Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	4 Kali	4 kali												4 Kali			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	1,225,000,000	2 Dokumen	1,300,000,000	2 Dokumen	1,350,000,000	2 Dokumen	1,400,000,000	10 Dokumen	5,425,000,000		
	4.1.3.201. 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	-				1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	575,000,000	1 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	2,225,000,000		
4.1.3.201. 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-				1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	575,000,000	1 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	2,225,000,000			
Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%	100%	305,663,400	100%	575,000,000	100%	632,500,000	100%	695,750,000	100%	765,325,000	100%	841,857,500	100%	3,816,095,900		
	4.01.03.2 02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah	100%	100%	305,663,400	100%	575,000,000	100%	632,500,000	100%	695,750,000	100%	765,325,000	100%	841,857,500	100%	3,816,095,900		
	4.01.03.2 02.01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tangjab Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	124,350,000												1 Dokumen	124,350,000	
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tangjab Barat			12 bulan	12 bulan													12 bulan			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	-		1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	302,500,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	366,025,000	5 Dokumen	1,526,275,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gjawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	4 kali	4 kali	36,313,400	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	36,313,400			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	181,500,000	1 Laporan	199,650,000	1 Laporan	219,615,000	5 Laporan	915,765,000	
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	12 Laporan	12 Laporan	145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	145,000,000			
				Jumlah laporan laporan tepra sismontepra	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	192,500,000	1 Laporan	211,750,000	1 Laporan	232,925,000	1 Laporan	256,217,500	5 Laporan	1,068,392,500	
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	100%	100%	788,950,288	100%	810,350,298	100%	2,626,870,000	100%	1,000,000,000	100%	1,522,500,288	100%	1,325,000,000	100%	8,073,670,874	
		4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan PBJ	100%	100%	788,950,288	100%	810,350,298	100%	2,626,870,000	100%	1,000,000,000	100%	1,522,500,288	100%	1,325,000,000	100%	8,073,670,874	
				Persentase OPD yang melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
				Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	100%	150 Paket	191,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Paket	191,450,000			
				Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	100%	150 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Paket	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	150 Dokumen	202,450,000	150 Dokumen	1,675,070,000	165 Dokumen	500,000,000	150 Dokumen	525,000,000	155 Dokumen	625,000,000	620 Dokumen	3,527,520,000	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase OPD yang melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	44 OPD	44 OPD	345,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,700,000		
				Jumlah pemeliharaan Co. Location	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala	2 Server	2 Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	44 Dokumen	363,400,000	44 Dokumen	600,000,000	44 Dokumen	300,000,000	44 Dokumen	545,700,000	44 Dokumen	400,000,000	176 Dokumen	2,209,100,000	

Bagian PBJ

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	-	84 Peserta											84 Peserta	251,800,288		
				Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	-	84 Peserta											84 Peserta			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	80 Orang	244,500,298	80 Orang	351,800,000	80 Orang	200,000,000	80 Orang	451,800,288	80 Orang	300,000,000	320 Orang	1,548,100,586		
	Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam			Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	100%	100%	438,758,700	615,000,000	100%	676,500,000	100%	744,150,000	100%	818,565,000	100%	900,421,500	100%	4,193,395,200		
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	100%	100%	438,758,700	615,000,000	100%	676,500,000	100%	744,150,000	100%	818,565,000	100%	900,421,500	100%	4,193,395,200		
				Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	99%	13 kali	85,739,600										78 kali	85,739,600		
				Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen											6 Dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	346,500,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	419,265,000	1 Dokumen	219,615,000	4 Dokumen	1,316,880,000		
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	100%	5 kali	285,416,600									5 kali	5 kali	285,416,600		
				Jumlah Laporan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan										1 Laporan	1 Laporan			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	-	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	461,191,500	4 Dokumen	1,322,341,500		
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	100%	5 kali	67,602,500										5 kali	67,602,500		
				Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi		1 Dokumen											1 Dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	381,150,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	4 Dokumen	1,115,415,000		
<b>JUMLAH TOTAL:</b>							62,766,863,606	127,615,493,287		141,501,219,126		141,180,412,413		134,451,588,897		152,035,047,987		759,550,625,316		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi Misi dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Kinerja setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	60,39 (B)	60,39 (B)	62,50 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)	68,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
2	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	CC	70%	75%	80%	83%	88%	90%	90%
4	Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	80	80	80,70	80,80	81,00	85,50	89,00	89,00
6	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	29	29	32	35	40	43	43
7	Skor LPPD	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4
8	Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%	85%	85%	87%	90%	95%	98%	98%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Kinerja setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar
12	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	80%	80%	80%	83%	86%	89%	95%	95%
14	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 7.1. disampaikan bahwa indikator kinerja pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 18 indikator yang merupakan indikator Sasaran Strategis dan disertai dengan target indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tabjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang dan mencerminkan dukungan Sekretariat Daerah dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Visi

**Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, *Kompetitif*, Aman dan Harmonis)**

dengan Misi :

Misi ke - 3

**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik**



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka visi dan misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur staf dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur staf merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan atau target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA harus ditingkatkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj-IP) , yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

